**LAMPIRAN II**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON**

**IDENTITAS PEMOHON**

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.*

1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2018.*

1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.*

1. **POKOK PERMOHONAN**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan sebagai berikut:*

* 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI...**
     1. **KABUPATEN/KOTA...**
     2. **KABUPATEN/KOTA...**
     3. **KABUPATEN/KOTA...**
     4. **KABUPATEN/KOTA… dst.** *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*
  2. **PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...**

**(*nama Provinsi yang diwakili*)**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.*

1. **PETITUM**
   1. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
   2. *Membatalkan Keputusan KPU Nomor … tentang … (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah).*
   3. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang benar menurut Pemohon.*

*- Kop surat -*

Jakarta,… Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor…,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .............................................................................................

Alamat : .............................................................................................

.............................................................................................

nomor telepon/HP.................................................................

*email* ....................................................................................

NIK : …………………………………..…………………………*(sesuai KTP)*

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi …, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor… dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst*.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor… yang beralamat di… nomor telepon/HP… *email*: … NIK/Kartu advokat.............., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.................................................................**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ...............................................................**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari…, tanggal…, pukul…, WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal…, Mei 2019;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.
7. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal…, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi…, Nomor Urut…;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal … Mei 2019;
12. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal… Mei 2019, pukul…, WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal…, Mei 2019 pukul…, WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi… dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

* 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan, sebagai berikut:*

* + 1. **KABUPATEN/KOTA...**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di*… *sebanyak*… *suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
2. *Penambahan suara bagi calon lain di* … *sebanyak*… *suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
3. *dst.*
   * 1. **KABUPATEN/KOTA...**

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di*… *sebanyak*… *suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
2. *Penambahan suara bagi calon lain di* … *sebanyak*… *suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
3. *dst.*
   * 1. **KABUPATEN/KOTA...**

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di*… *sebanyak*… *suara dikarenakan (bukti P-...).*
2. *Penambahan suara bagi calon lain di*… *sebanyak*… *suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
3. *dst.*
   * 1. **KABUPATEN/KOTA…, dst.** *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*
   1. **PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA**

*Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.*

**Tabel …. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI…**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon**  **Anggota DPD** | **Kabupaten/Kota** | | | **Jumlah** |
| ... | ... | dst. |
| 1. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. | dst. | ... | ... | ... | ... |

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang… (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal… Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi…, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | ... | ... |
| **Total Suara Sah** | | ... |

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst*.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.